



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI
DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SEI KERANJI
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara*



OLEH:

DIAH AMELIA HANIP
11575201895

PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DIAH AMELIA HANIP

NIM : 11575201895

FAKULTAS/JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial/ Ilmu Administrasi Negara

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SUNGAI KERANJI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DISETUJUI OLEH:

DOSEN PEMBIMBING

Ratna Dewi, S.Sos, M.Si

NIP: 19811030 200710 2 004

MENGETAHUI:

DEKAN I

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara



Dr. Drs. H. MUH. SAID, HM, M.Ag, MM

NIP. 19620512 198103 1 003

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si

NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : DIAH AMELIA HANIP
 NIM : 11575201895
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SUNGAI KERANJI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 HARI/TANGGAL : 23 April 2020

PANITIA PENGUJI :

KETUA


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I


Mashuri, MA
 NIP : 19770721 201411 1 002

PENGUJI II


Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
 NIK : 130 712 074



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SEI KERANJI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DIAH AMELIA HANIP

Nim : 11575201895

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sei Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi kebijakan program bantuan rumah sederhana layak huni dalam penanggulangan masyarakat miskin di desa Sei Keranji serta kendala dalam proses implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sei Keranji. dengan indikator Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dengan mengacu pada peraturan Gubernur Riau nomor 17 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan pembangunan bidang permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian Deskriptif yaitu data yang diperoleh dianalisa dengan menguraikan dan mengaitkan dengan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak huni ada dua yaitu faktor pendorong yakni Sosialisasi yang dilakukan, pengetahuan masyarakat yang tinggi, komunikasi yang efektif antara TPM,OMS dan masyarakat, sumber daya yang berkualitas, sikap baik pelaksana, dan SOP yang jelas dan sistematis. Sedangkan faktor penghambat yaitu penerima bantuan yang tidak tepat, pelaksanaan RSLH yang tidak sesuai SOP.

Kata Kunci : Implementasi, Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunia yang limpahkan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan ini tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan Terimakasih banyak kepada :

1. Kedua orang tua Ayah Gito, Ibu Suparti dan untuk seluruh keluarga yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi dorongan moril maupun materi selama menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Drs. Muh Said, HM., M.Ag, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan dan Ibu Weni Puji Astuti selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan bimbingan mulai dari awal pekerjaan sampai selesainya skripsi ini.
5. Bapak Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si dan Bapak Jhon Afrizal, S.HI, M,A selaku pembimbing akademik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yang telah banyak berjasa memberikan sumbangan pemikiran demi kemajuan wawasan pengetahuan penulis.
7. Pemerintahan Desa Sei Keranji dan masyarakat yang telah membantu penulis dalam menyediakan data-data dan informasi yang penulis perlukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Sahabat penulis, Puputtyaas, Suci Aprianingsih, Noviana Rahayu, Diana Syafitri, Ria Syafitri, dan Teman-teman ANA E 2015, kebersamaan dengan kalian telah mengajarkan banyak hal, Terimakasih buat kebersamaan kita selama ini, semoga kebersamaan ini bisa terjalin selamanya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala dukungan dan bantuan yang telah penulis terima. Mudah-mudahan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamualikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 23 April 2020

Penulis,

DIAH AMELIA HANIP
NIM. 11575201895



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Kebijakan Publik	15
2.2 Implementasi Kebijakan.....	25
2.3 Sumber Daya Manusia	30
2.4 Pemberdayaan Masyarakat.....	33
2.5 Pengertian Pembangunan	36
2.6 Kemiskinan.....	38
2.7 Penelitian Terdahulu.....	40
2.8 Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan	41
2.9 Defenisi Konsep	42
2.10 Konsep Operasional	43
2.11 Kerangka Pemikiran	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Metodologi Penelitian	45
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.3	Jenis Dan Sumber Data	45
3.4	Teknik Pengumpulan Data	46
3.5	Analisi Data.....	46
3.6	Informan Penelitian	47

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1	Letak Geografis dan Demografis Desa Sungai Keranji.....	49
4.2	Sosial Ekonomi.....	51
4.3	Pendidikan dan Kehidupan Beragama	53
4.4	Kebudayaan dan Adat Istiadat.....	56
4.5	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sungai Keranji.....	58

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1	Bagaimana Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	59
5.2	Kendala dalam Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.....	78

BAB VI

PENUTUP

6.1	Kesimpulan	82
6.2	Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Shie Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Kepala Keluarga Miskin Tahun 2016-2019 di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	9
Tabel 1.2	Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni didesa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2019	10
Tabel 4.1	Luas Wilayah Desa Sungai Keranji.....	50
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Menurut usia	51
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Keranji	52
Tabel 4.5	Kepemilikan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	53
Tabel 4.6	Jumlah Sarana Pendidikan.....	54
Tabel 4.7	Tingkat Pendidikan Penduduk.....	61
Tabel 4.8	Jumlah Penduduk Desa Sungai Keranji	62
Tabel 4.9	Jumlah Prasarana Peribadatan	62
Tabel 5.1	Jumlah Implementator.....	67
Tabel 5.2	Jumlah Dana yang disalurkan.....	71
Tabel 5.3	Data Usulan	77

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kondisi Fisik Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sei Banyak Ikan.....	11
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	44
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	58



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Kemiskinan adalah suatu masalah yang mempengaruhi kesejahteraan setiap masyarakat hal ini disebabkan oleh pendapatan yang tidak tetap, sumber mata pencarian yang tidak tetap, rendahnya lapangan pekerjaan serta keterbatasan keterampilan yang dimiliki sehingga menjadi salah satu indikator masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah. Hak pemenuhan atas rumah menjadi salah satu komponen penting yang perlu diperhatikan pemerintah karena kondisi rumah yang dimiliki masyarakat miskin tidak memenuhi kriteria rumah layak huni.

Kemiskinan di Indonesia bukan hal yang baru kita lihat dan kita dengar, angka kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi. Berbagai program telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi angka kemiskinan dinegara ini, namun hal ini sepertinya tidak kunjung berkesudahan. Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian negara Indonesia.

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir disemua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga Negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia. Masalah kemiskinan lebih cenderung merupakan suatu masalah kebijakan politik yang berkaitan dengan masalah kebijakan pembangunan pada umumnya baik level atas maupun level bawah.

Amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 28A dan 28H menyebutkan bahwa untuk mempertahankan kehidupannya, setiap warga negara berhak untuk mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pada Pasal 3 di Sebutkan Beberapa Langkah di Antaranya:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni sarana pembinaan keluarga cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan

keluarga tidak saja mencakup aspek fisik tetapi juga mental dan sosial untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus di penuhi syarat fisik, yaitu aman sebagai tempat berlindung , secara mental memiliki rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah sederhana layak huni, di harapkan tercapai ketahanan keluarga.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat, salah satu program yang dilaksanakan yaitu pembangunan rumah sederhana layak huni sasarannya masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dan tidak tetap, baik dipedesaan maupun diperkotaan yang belum memiliki rumah atau sudah memiliki rumah tetapi tidak layak huni. Metode pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni menurut Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2011 yaitu:

1. Prinsip pengelolaan

Prinsip-prinsip penyelenggaraan program ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat hal ini berlaku baik dalam pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana pedesaan/kelurahan terbangun.
- b. Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat melalui penyediaan media

komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.

- c. Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan (Accountable) dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, ketepatan mutu pekerjaan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pedesaan/kelurahan yang mandiri oleh masyarakat.

2. Pendekatan

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui:

- a. Keberpihakan kepada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin.
- b. Otonomi dan desentralisasi, masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, maupun pemanfaatan hasilnya.
- c. Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.
- d. Keswadayaan, motivasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pemanfaatan hasil kegiatan.

3. Keberhasilan

Tingkat keberhasilan pelaksanaan program ini ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Terbangunnya rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin, infrastruktur dasar berupa jalan pedesaan/kelurahan, air minum pedesaan/kelurahan dan peningkatan kualitas pemukiman masyarakat pinggir sungai.
- b. Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab terhadap berkelanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun.
- c. Memenuhi 3T yaitu: tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi No. 6 Tahun 2009 Tentang Tujuan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa:

1. Peningkatan Pelayanan Masyarakat.
2. Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
5. Pengembangan kemitraan

Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah Desa, pembangunan dan kemasyarakatan, dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh gubernur, walikota, bupati dan kecamatan. Salah satu tugas dari pemerintahan Desa adalah melaksanakan pembangunan, dalam hal ini pemerintahan Desa memiliki wewenang yaitu mengupayakan

realisasi bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni di Desa Sei Keranji untuk mensejahterakan masyarakat miskin.

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya, yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermanfaat, kemiskinan harus ditanggulangi secara bersinergi oleh pemerintahan bersama masyarakat, penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

1. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin.
2. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Peraturan Gubernur Riau No 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan masyarakat, salah satunya ialah program pembangunan rumah sederhana layak huni sasaran pembangunan ini adalah masyarakat di Desa Sei Keranji yang tergolong miskin dan tertinggal. Kriteria desa yang dapat menerima bantuan prioritas, banyaknya rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni dan desa yang kondusif. Untuk mencapai pembangunan rumah sederhana layak huni ini para pelaku yang terkait dalam implementasi pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana layak huni harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berpedoman pada prinsip pengelolaan, pendekatan dan indikator keberhasilan.

Keberhasilan dari program ini ditandai dengan terbagunnya rumah sederhana layak huni bagi masyarakat miskin.

Melalui program bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni ini diharapkan dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasarnya yakni rumah yang layak huni, karena kemiskinan pada umumnya merupakan salah satu indikator bagi masyarakat tidak mampu memperoleh rumah yang layak huni. Dalam hal ini perlu adanya peran yang serius dari pemerintah dalam menangani angka kemiskinan dan melalui program ini diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat miskin untuk memiliki tempat tinggal yang layak huni sebagai mana amanah dari peraturan perundang-undangan. Indikator kemiskinan pada suatu rumah tangga berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter bujur sangkar perorang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Tidak memiliki toilet
4. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
5. Masyarakat yang tidak memiliki mata pencarian tetap
6. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari papan yang mudah rusak.
7. Bahan bakar sehari-hari masih megunakan kayu bakar/minyak tanah
8. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih membutuhkan bantuan zakat dan raskin.

Kepedulian pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan diharapkan terlaksana sebagai mana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, demikian halnya dengan adanya kebijakan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni dapat membantu masyarakat Desa Sungai Keranji yang masih dibawah garis kemiskinan yang memiliki rumah tidak layak huni.

Kriteria kepala keluarga yang layak menerima bantuan rumah sederhana layak huni adalah:

1. Memiliki E-ktp/kartu identitas diri yang berlaku.
2. Kepala keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
3. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin.
4. Tidak memiliki aset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
5. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan/desa atas status tanah.
6. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut:
 - a. Tidak permanen atau sudah rusak.

- b. Dinding dan atap dibuat dari bahan yang muda rusak/lapuk seperti papan, bambu, dan ilalang.
- c. Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan keselamatan penghuninya.
- d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak.
- e. Diutamakan masyarakat berusia lanjut yang sudah tidak bekerja.

Desa Sungai Keranji Merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, dan kondisi dari masing-masing Kepala Keluarga berdasarkan hasil observasi penulis berada pada taraf Kemiskinan.

Berikut merupakan gambaran tentang keadaan jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga.

Tabel 1.1
Jumlah Kepala Keluarga Miskin Tahun 2016-2018 di Desa Sungai Keranji
Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Tahun	Jumlah kepala keluarga	Jumlah kepala keluarga miskin	Presentase (%)
1	2016	730 kepala keluarga	40 kepala keluarga	5,47%
2	2017	734 kepala keluarga	43 kepala keluarga	5,85%
3	2018	742 kepala keluarga	43 kepala keluarga	5,79%
4	2019	753 Kepala keluarga	50 kepala keluarga	6,64%

Sumber: Kantor Desa Sungai Keranji 2019

Dari tabel diatas menjelaskan tentang jumlah masyarakat miskin yang ada di Desa Sungai Keranji, dari tahun ketahun jumlah masyarakat miskin yang berada di Desa Sungai Keranji terus meningkat. Hal ini disebabkan karena mata pencarian penduduk yang kurang menjanjikan, kebanyakan dari masyarakat menggantungkan hidup mereka dari hasil perkebunan karet dan sawit. Hasil dari kebun karet,sawit dan bercocok tanam ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

pokok mereka apalagi mereka hanya bekerja kepada orang lain yang hasil dari perkebunan tersebut dibagi dua dengan pemilik kebun, jika harga karet turun maka berkurang pula pendapatan mereka begitu pula dengan sawit jika harga sawit turun maka berkurang pula penghasilan mereka karna pendapatan yang tidak stabil ini menjadi indikator masyarakat tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan pokok dan membangun rumah yang layak huni.

Berikut merupakan Usulan bantuan pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang ada di Desa Sungai Keranji.

Tabel 1.2
Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni di desa
Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun
2016-2019.

No	Tahun	Usulan	Dana Per Unit	Lokasi
1	2016	40	Rp. 35.000.000	Sei Keranji
2	2017	43	Rp. 40.000.000	Sei Keranji
3	2018	43	Rp. 45.000.000	Sei Keranji
4	2019	53	Rp. 45.000.000	Sei Keranji

Sumber: Kantor Desa Sungai Keranji 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni tahun 2016 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 40 kepala keluarga, pada tahun 2017 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 43 kepala keluarga dan pada tahun 2018 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 43 kepala keluarga, dan pada tahun 2019 usulan bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni sebanyak 50 kepala keluarga, namun dari sekian banyak yang telah di usulkan oleh pemerintahan desa hanya di tahun 2017 yang sudah terealisasi namun tidak sesuai dengan yang di usulkan karena hanya dua unit rumah saja yang mendapatkan bantuan program rumah sederhana layak hunidan

di tahun 2019 terdapat 20 unit rumah yang dapat terealisasi. Kebijakan program bantuan rumah sederhana layak huni tidak di jalankan sesuai pedoman yang di tetapkan dalam Peraturan Gubernur No 17 Tahun 2011. Pembangunan belum sepenuhnya mengarah pada sasaran, hal ini ditandai dengan tidak maksimalnya dampak atau hasil pembangunan rumah sederhana layak huni yang merupakan inti dari kebijakan tersebut, yang pada dasarnya sasaran kebijakan ini yaitu masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah serta memiliki rumah tidak layak huni, pada umumnya masyarakat miskin yang ada di Desa Sei Keranji termasuk dalam kriteria kepala keluarga yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki rumah yang layak huni. Namun hingga saat ini masyarakat miskin yang ada di Desa Sungai Keranji belum seluruh nya mendapatkan bantuan rumah sederhana layak huni.

Berikut merupakan kondisi fisik Rumah salah satu warga yang tidak layak huni.

Gambar 1.1
Kondisi Fisik Rumah Tidak Layak Huni di Desa Sungai Keranji.



Sumber: Kantor Desa Sungai Keranji 2019

Dari gambar diatas merupakan bentuk kondisi fisik Rumah yang tidak layak huni dimana dari bangunannya saja menggunakan kayu atau papan yang sudah usang bagian atap pun dimana-mana terdapat celah yang menyebabkan kebocoran pada saat terjadi hujan, dan pada lantainya walaupun sudah di semenisasi namun sudah terjadi keretakan pada lantai tersebut dan bagian dapurnya tidak di semen.

Dari gambaran diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni dalam penanggulangan masyarakat miskin di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja kendala dalam implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan untuk menambah wawasan terutama bagi diri peneliti sendiri.
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang mendalami kajian-kajian yang sama yang berhubungan dengan keluarga miskin yang tentunya dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagaimana pelaksanaan implementasi program bantuan rumah sederhana layak huni dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana skripsi ini dibagi kedalam 6 (enam) bab, yang mana bagian-bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang teori-teori dan definisi konsep.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan di uraikan mengenai lokasi penelitian,dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini merupakan bagian yang berisikan tentang keadaan dari tempat di adakan penelitian, kantor Desa Sungai Keranji kemudian akan diterangkan struktur organisasi,serta yang lain-lain yang dapat menjelaskan keberadaan dari kantor Desa Sungai Keranji.

BAB V : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang dapat memberikan sumbangan pemikiran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Daerah/Provinsi, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Bupati/Walikota.

Kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Berbicara mengenai kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*), meskipun dalam penerapan dan penggunaan keduanya sering dipersamakan. Kebijakan merupakan kesepakatan bersama dari berbagai persoalan yang timbul dalam masyarakat dan sudah disahkan oleh masyarakat itu sendiri melalui lembaga yang berwenang untuk dilaksanakan. Sedangkan kebijaksanaan merupakan suatu rangkaian tindakan dari aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi oleh personal/individu pejabat yang berwenang. Dengan demikian, yang ada terlebih dahulu adalah kebijakan, sedangkan kebijaksanaan ada setelah suatu kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut disepakati. Jadi tidak mungkin suatu kebijaksanaan timbul sebelum adanya kebijakan.

Menurut Thomas R. Dye Dalam Solichin (2012:14) kebijakan publik adalah sebuah keputusan yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Menurut William N. Dunn Dalam Harbani Pasolong (2011:39) mengatakan bahwa kebijakan publik suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maksud dari definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan memiliki tanggung jawab mengatasi permasalahan sosial dengan merumuskan sebuah kebijakan untuk memecahkan permasalahan sosial yang terjadi.

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian kebijakan publik pernyataan tentang tujuan, sasaran dan sarana diterjemahkan kedalam program-program tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan dalam sebuah kebijakan. Jadi berbagai program bisa dikembangkan, untuk merespon tujuan kebijakan yang sama, dan mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Menurut Woll dalam Tangkilisan (2005:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Pressman dan Widavsky dalam Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor dari pemerintah. Menurut Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 6), kebijakan publik merupakan hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak beranggapan bahwa konsep tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Thomas R.Dye dalam Subarsono (2005: 2) kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*) konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi sesuatu masalah publik. Definisi kebijakan publik ini memiliki makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Kemudian dalam proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses. Proses atau tahap-tahap kebijakan publik menurut Duunsebagaimana dikutip oleh Winarno (2007: 34) meliputi:

- a. Tahap penyusunan agenda
- b. Tahap formulasi kebijakan
- c. Tahap adopsi kebijakan
- d. Tahap implementasi kebijakan
- e. Tahap evaluasi kebijakan

Menurut Andersondalam Suharno (2010: 24-25) menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.
- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulator versus kebijakan redistributive. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulator merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- c. Kebijakan materil versus simbolik. Kebijakan materil adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolik adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*) kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Menurut Wahab (2012: 24) hakikat kebijakan publik sebagai jenis tindakan yang mengarah pada tujuan akan dapat dipahami dengan lebih baik apabila kebijakan itu diperincikan lebih lanjut kedalam beberapa kategori berikut

1. Tuntutan kebijakan (*policy demand*), yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri. Tuntutan ini dapat bervariasi mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi didalam masyarakat.

2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) yaitu keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.
3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*), yaitu pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu, misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan pengadilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Keluaran kebijakan (*policy outputs*), yaitu merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dilaksanakan oleh pemerintah.
5. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*), yaitu akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dimasyarakat.

Menurut Nugroho (2008: 103) jenis-jenis kebijakan publik antara lain:

- a. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan.
- b. Kebijakan yang dibuat hanya oleh eksekutif.
- c. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk kerja sama antara legislatif dan eksekutif.

Young dan Quinn dalam Suharto (2005 :44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk mencegah masalah sosial. Namun kebijakan publik juga bisa dirumuskan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan keyakinan masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seseorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisikan sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintahan, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintahan.

Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena didalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksana kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih dari pada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Dari penjelasan diatas, kebijakan publik dapat diarti sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam kehidupan masyarakat dan mempunyai peranan dalam penyusunan kebijakan tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.1 Ciri-ciri Kebijakan Publik

1. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, misalnya hadir unit-unit perencanaan pembangunan ditingkat nasional maupun daerah.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, misalnya kebijakan tidak hanya mencakup membuat undang-undang dalam bidang tertentu melainkan diikuti dengan prosedur pelaksanaan yang lebih detail.
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengurangi angka kemiskinan dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Kebijakan publik bisa berbentuk positif bisa pula negatif, dalam bentuk yang positif akan mencakup beberapa tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu, dalam bentuk yang negatif, keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, dalam masalah-masalah dimana campurtangan pemerintah itu sebenarnya justru amat diperlukan (Solichin, 2012:20-22).

2.1.2 Proses Kebijakan Publik

Menurut AG. Subarsono dalam Harbani Pasolong (2011:41) mengatakan bahwa proses kebijakan publik adalah serangkaian intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut mulai dari (1)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyusunan agenda, (2) formulasi kebijakan, (3) adopsi kebijakan, (4) implementasi kebijakan, (5) evaluasi kebijakan.

Tahap Penyusunan agenda, para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Pada tahap ini masalah-masalah berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan dan pada akhirnya masuk kedalam agenda para perumus kebijakan.

Tahap formulasi kebijakan, masalah yang sudah masuk keagenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik, pemecahan masalah tersebut lahir dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Tahap adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, yang pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dari dukungan mayoritas legislatif, konsensus direktur lembaga atau keputusan peradilan.

Tahap implementasi kebijakan, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni yang dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan di tingkat bawah.

Tahap evaluasi kebijakan, dalam tahapan ini kebijakan yang sudah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah (Budi Winaro, 2008:33-34).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Implementasi Kebijakan

2.2.1 Pengertian Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang paling penting karena dalam implementasi kebijakan itu melibatkan sebuah proses yang sangat kompleks dan menyangkut banyak pihak. Menurut Kamus Webster dalam Wahab (2012:135), secara *lexicografis* merumuskan bahwa istilah *to implement* (mengimplementasikan) itu berarti “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) ; *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Lester, et al. Dalam Sujianto (2008:31) mengemukakan bahwa implementasi dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, hasil dan sebagai suatu akibat. Dikatakan sebagai suatu proses implementasi merupakan rangkaian keputusan dan tindakan yang dimaksud untuk menetapkan suatu keputusan otoritatif awal dari legislatif pusat kedalam suatu akibat atau efek. Maka ciri utama dari proses implementasi adalah kinerja yang tepat waktu dan memuaskan. Sebagai hasil implementasi berkaitan dengan tingkat seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Akhirnya pada tingkat tertinggi implementasi sebagai akibat mengimplementasikan bahwa ada beberapa perubahan yang dapat diukur dalam masalah-masalah yang menjadi program. Jadi, menurut konsepsi Lester, et al. Implementasi didefinisikan sejauh mana arah dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar tercapai.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Van Meter dan Van Hom dalam Wahab (2012:135) merumuskan proses implementasi sebagai *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan publik).

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Rasionalitas atau alasan dibalik langkah seperti ini tak lain dimaksudkan agar sikap, perilaku, dan pikiran dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dapat lebih terkontrol serta tetap terjaga pada relnya. Dengan demikian, tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai secara memuaskan (Wahab, 2012:133).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas yang mendefinisikan implementasi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok), proses tersebut dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Proses Implementasi

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, salah satunya adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Implementasi yang berhasil biasanya terjadi manakalah suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Studi terhadap implementasi kebijakan berkaitan erat dengan suatu kenyataan. Banyak kebijakan yang gagal pada tahap implementasi. Terhadap variasi pandangan dari ahli menyangkut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan.

Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi atau kebijaksanaan yaitu:

1. Isi kebijaksanaan

Kebijaksanaan dikatakan gagal karena masih samanya isi dan tujuan kebijaksanaan, tidak memiliki ketetapan dan ketidak tegasan dalam bentuk interen dan eksteren dari kebijaksanaan itu sendiri.

2. Sosialisasi

Terjadinya kekurangan informasi, maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik terhadap objek kebijaksanaan ataupun kepada para pelaksana dari isi kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijaksanaan itu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dukungan

Didalam kebijaksanaan akan sangat sulit didalam pelaksanaannya jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijaksanaan tersebut.

4. Pembagian potensi

Dalam pembagian potensi antara parah aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang. Tahap implementasi tidak dimulai saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijakan sebelumnya, tahap implementasi baru terjadi setelah pengalokasian sumberdaya dan dana yang telah disepakati. Studi implementasi program lebih menekankan kepada pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian sasaran kebijaksanaan.

Model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George Edward III dalam Sujianto (2008: 38) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika menjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.

2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansal menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.
3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam aras program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujurannya membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapapun. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat. Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari “virus weberian” yang kaku, terlalu hirarkis dan birokratis.

2.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan motor penggerak dan aset penting yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan suatu organisasi/perusahaan. Perkembangan zaman dan persaingan di era globalisasi saat ini yang semakin maju dan menantang sangat menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu mengembangkan diri secara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proaktif. SDM harus menjadi manusia-manusia pembelajar, yaitu pribadi-pribadi yang mau belajar dan bekerja keras dengan penuh semangat, sehingga potensi dirinya berkembang maksimal. Dalam rangka persaingan ini, organisasi/perusahaan harus memiliki sumber daya yang tangguh. Sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah organisasi tidak dapat dilihat sebagai bagian yang berdiri sendiri, tetapi harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang tangguh membentuk suatu sinergi. Dalam hal ini peran sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan.

Semula sumber daya manusia (SDM) merupakan terjemahan dari “*human resources*”, namun ada pula ahli yang menyamakan sumber daya manusia dengan “*manpower*” (tenaga kerja), bahkan sebagian orang menyetarakan pengertian sumber daya manusia dengan personal (personalia, kepegawaian, dan sebagainya) (Sutrisno, 2011:3).

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa). Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan.

Werther dan Davis dalam Sutrisno (2011:4), menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah “pegawai yang siap, mampu dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. Sebagaimana dikemukakan bahwa dimensi pokok sumber daya adalah kontribusinya terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia adalah perlakuan kontribusi terhadapnya yang pada gilirannya akan menentukan kualitas dan kapabilitas hidupnya.

Sumber daya manusia berkualitas tinggi menurut Ndraha dalam Sutrisno (2011: 4) adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: *intelligence*, *creativity*, dan *imagination*; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air, tenaga otot, dan sebagainya.

Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan keputusan.

Pengambilan suatu keputusan yang terbaik yang dihasilkan oleh suatu sumber daya manusia menunjukkan kinerja seseorang dan kemampuannya untuk menganalisis suatu masalah dalam lingkup kerja dan jabatannya. Namun hal tersebut juga tidak terlepas dari kejelian dan ketepatan dalam proses menentukan seorang pegawai untuk berada dalam suatu pekerjaan dan jabatan tertentu. Pegawai yang mampu melakukan pekerjaan tertentu mungkin akan lebih tepat dan baik jika dia ditempatkan pada bidang tertentu juga. *The right man on the right place*, akan membawa suatu organisasi pada hasil kinerja yang maksimal dan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam tugas atau pekerjaan.

Keputusan yang menentukan apakah organisasi dapat menentukan atau mengembangkan sumber daya manusia sebaiknya dilakukan secara terstruktur dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhimpun dalam suatu sistem yang baik sehingga proses penentuannya dapat cepat dilakukan dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi sebelumnya seperti kesalahan menunjuk seseorang yang tidak tepat dalam pekerjaannya. Seorang pekerja akan mampu mengambil keputusan yang baik bila dia memahami dan mampu dalam bidang ruang lingkup yang dia hadapi. Sumber daya manusia yang baik apabila ia mampu mengambil keputusan dengan baik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu semua tergantung dengan kemampuan intelektual dan analisis dari sumber daya manusianya. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa tanpa adanya sumber daya manusia ini sebuah organisasi tidak akan berarti apa-apa.

Dari penjelasan diatas maka sumber daya manusia (SDM) dapat diartikan sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi, dimana manusia tersebut bersumber daya dan merupakan suatu kekuatan (*power*). Maka dari itu agar menjadi sebuah kekuatan, sumber daya manusia harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat Menurut Prijono dan Pranarka dalam Sulistiyani (2004) pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua to give ability to or enable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang atau yang belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Pendekatan utama yang harus dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek/ program pembangunan, dalam hal ini khususnya proyek/ program pembangunan desa, akan tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan itu sendiri.

Pemberdayaan sendiri oleh Edi Suharto (2005) adalah sebuah proses, yang dengan proses itu individu maupun komunitas memperoleh penguasaan dan kontrol atas hidup mereka sendiri dan partisipasi demokratis dalam kehidupan masyarakat mereka. Berdasarkan skema itu, pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio politik dan kompetensi partisipatif.

Sumodiningrat (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses perubahan dari ketergantungan menuju padakemandirian. berbagai pandangan yang berkembang dalam teori pembangunan, baik dibidang ekonomi maupun administrasi, menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian dan sasaran sekaligus pelaku utama pembangunan, atau dengan kata lain masyarakat tidak hanya merupakan obyek, tetapi sebagai subyek pembangunan. pandangan ini muncul sebagai tanggapan atas terjadinya kesenjangan seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha yang memungkinkan suatu kelompok atau masyarakat mampu bertahan (survive) dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dalam rangka mencapai tujuan bersama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kerangka pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat dapat dilakukan melalui 3 (tiga) dimensi, yakni :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. titik tolak dari pemikiran ini adalah pemahaman bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. pemberdayaan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya untuk membangun potensi itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering), sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyesiaan berbagai masukan serta pembukaan berbagai akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang.
3. Melindungi, yakni dalam proses pemberdayaan harus dapat dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah.

Tujuan Pemberdayaan Menurut catatan Ife dalam bukunya Miftachul Huda (2009) disebutkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). “*Empowerment aims to increase the power of the disadvantaged*” tulis Ife. Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yakni *power* dan *disadvantaged*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5 Pengertian Pembangunan

Menurut suryadi (2005: 64) pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat memulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut.

Menurut Jumodiningrat (dalam Nugroho Dan Dahuri (2004:9) pembangunan adalah suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang lebih manusiawi.

Menurut Sondang p. Siagian (2009:4) pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka membina bangsa.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan adalah proses kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berusaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka membina bangsa. Dari definisi ini akan muncul beberapa ide pokok:

1. Pembangunan merupakan suatu proses artinya serangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan.
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan.
5. Pembangunan mengarah kepada modernitas yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya.
6. Modernitas mencakup seluruh segi kehidupan bangsa dan negara, yang dapat menjangkau dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
7. Semua hal yang telah diuraikan diatas ditujukan pada usaha pembinaan bangsa yang semakin kokoh untuk memajukan suatu negara.

Talizudhu ndraha (2003:14) mengemukakan bahwa keberhasilan pemerintahan dari suatu pembangunan desa/kelurahan ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Ada faktor rencana yang realitis disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
2. Adanya kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan apa yang dilaksanakan.
3. Adanya kepemimpinan yang konsekuen dan konsisten dalam mengupayakan pembangunan tahap berikutnya dapat terlaksana sebagai mana mestinya.

Masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang perlu perhatian khusus dari pemerintahan untuk menuju kesejahteraan. Sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan manusia secara utuh lahir dan batin serta merata. Terwujudnya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun non material secara merata.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Kemiskinan

Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dinegara-negara berkembang. Kemiskinan suatu masalah yang harus dipecahkan upaya pemecahan kemiskinan tersebut sebagai upaya untuk mempercepat suatu proses pembangunan yang selama ini dilaksanakan.

Secara umum terdapat beberapa definisi kemiskinan dan kriteria garis kemiskinan yang digunakan saat ini. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan strategi penanggulangan kemiskinan, tergantung dari definisi mana yang digunakan. Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mau menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (BAPPENAS dalam TIM Crescent.2003:4).

Menurut Suptriana (2000:196) kemiskinan merupakan suatu situasi serba kekurangan yang terjadi bukan dikehendaki oleh miskin, pada umumnya ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraannya sehingga menunjukkan lingkaran ketidak berdayaan. Kemiskinan disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki dan dimanfaatkan terutama dari tingkat pendidikan informal yang rendah.

Menurut Sudantoko (2009:43-46) definisi kemiskinan ada tiga yaitu kemiskinan relative, kemiskinan absolute, kemiskinan structural dan cultural. Kemiskinan relative merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolute ditentukan berdasarkan ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan structural dan cultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang.

Kemiskinan lazimnya dilukiskan sebagai kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Mereka dikatakan berada dibawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok seperti tempat tinggal, pangan, pakaian dan lain-lain. (Hartomo dan Aziz Arnicun, 2001: 329).

Menurut Parsudi Suparlan (dalam Hartomo, Dkk, 2004:315) menyatakan kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah , yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Yang berada dibawah garis kemiskinan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, keterampilan dan sebagainya.
2. Tidak memiliki faktor produksi kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatansendiri, seperti memperoleh tanah garapan atau modal usaha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tingkat pendidikan mereka yang rendah, tidak samapai tamat sekolah dasar karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan.
 4. Kebanyakan tinggal didesa sebagai pekerja bebas.
 5. Banyak yang hidup dikota berusia muda tidak mempunyai keterampilan.
- (Hartomo, Dkk, 2004:316-318).

2.7 Penelitian Terdahulu

Apri Neli (2015) yang melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Rumah Sederhana Layak huni Bagi masyarakat miskin dikelurahan Batu Bersurat Kecamatan XII Koto Kampar Kabupaten Kampar ”**. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah kurang nya secara formal kepada masyarakat tentang program RTLH , yang ditandai dengan ketidak tahuan masyarakat dengan kebijakan tersebut, adanya penyelewengan dana oleh aparat pengurus, dan sasaran pemabangunan tidak tepat sasaran. Dari analisis didapatkan bahwa program pengatasan kemiskinan di Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik.

Mandra Kumara (2017) judul **“Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam menanggulangi kemiskinan (studi kasus di di Desa Sei Banyak Ikan Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu)”**.Pembahasan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerapan atau implemetasi program rumah layak huni di desa Sei Banyak Ikan. Dalam hasil penelitian ini bahwa dapat dikatakan implementasi program rumah layak huni belum berjalan dengan baik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana dalam penelitian ini memiliki permasalahan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu, bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni di Desa Sungai Keranji tidak semua usulan mendapatkan rumah sederhana layak huni. Dan juga lokasi dan tempat penelitian berbeda.

2.8 Pandangan Islam terhadap Kemiskinan

Kemiskinan termasuk suatu masalah yang harus diselesaikan dikalangan masyarakat, dalam rangka mengetas kemiskinan, AL-QUR'AN menganjurkan banyak cara yang harus ditempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok yaitu:

1. Kewajiban setiap individu.
2. Kewajiban orang lain dan masyarakat.
3. Kewajiban pemerintah.

Kewajiban setiap individu tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Kerja dan usaha merupakan cara utama yang ditekankan oleh kitab suci AL-QUR'AN, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya.

Kewajiban orang lain atau masyarakat tercermin pada jaminan satu rumpun keluarga, dan jaminan sosial dalam bentuk zakat dan sedekah wajib.

Dalam AL-QUR'AN surat Adz-Dzariyaat ayat 19 dijelaskan :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian, orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Dari ayat diatas telah dijelaskan didalam AL-QUR’AN menetapkan kewajiban membantu keluarga oleh rumpun keluarganya, dan kewajiban setiap individu untuk membantu anggota masyarakatnya.

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting diantaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah atau perdagangan maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut diatas belum mencukupi.

Surat Al-Maa’uun ayat 1-7:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ : ١ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ : ٢ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ : ٣
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ : ٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ : ٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ : ٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ : ٧

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?,itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna”.

2.9 Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian konsep diatas dapatdirumuskan defenisi konsep pada karya ilmiahini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebijakan publik adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
2. Implementasi kebijakan adalah tindakan pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Evaluasi kebijakan adalah suatu usaha sistematis untuk menentukan tingkat seberapa jauh masalah telah secara nyata dapat diatasi.
4. Pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka untuk meraih perubahan.
5. Kemiskinan adalah keterbatasan seseorang dan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. memerlukan bantuan pangan penduduk miskin seperti zakat dan raskin.

2.10 Konsep Operasional

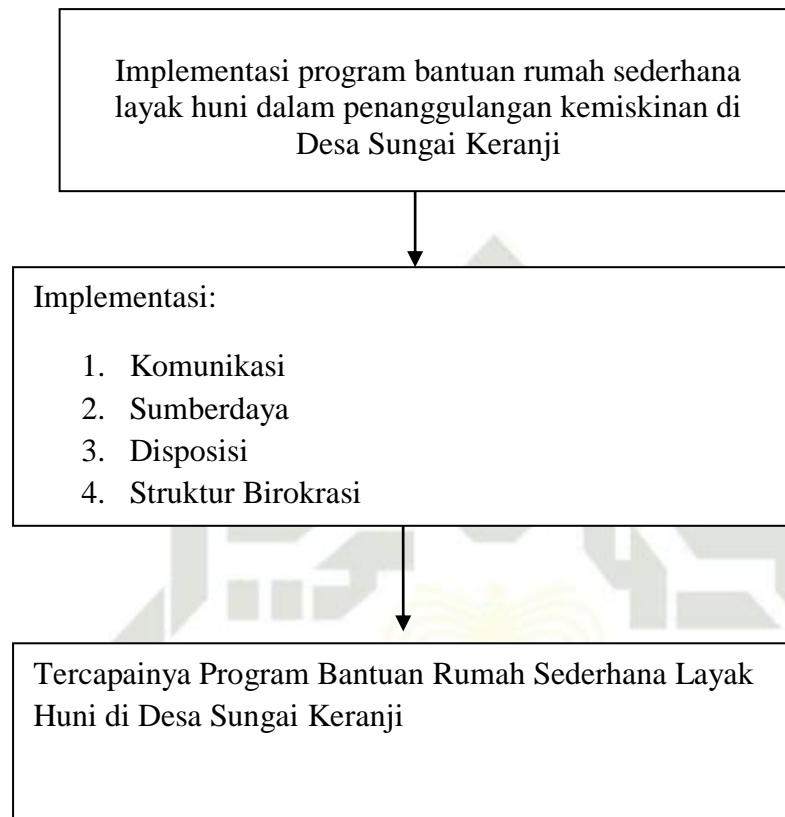
Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program bantuan rumah sederhana layak huni (RSLH)	1. Komunikasi	a. Sosialisasi b. Kejelasan informasi c. Konsisten
	2. Sumberdaya	a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Finansial
	3. Disposisi atau Sikap Pelaksana	a. Kejujuran pelaksana RSLH b. Komitmen pelaksana RSLH c. Demokratis.
	4. Struktur Birokrasi	a. Standar Operasional Prosedur (SOP), b. Struktur Birokrasi Pelaksana

Sumber: George C. Edward III dalam Sujianto (2008)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Teori Implementasi George C. Edward III dalam Sujianto (2008)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif, dimana hasil akhir dari penelitian ini dijabarkan dengan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan hasil akhir penelitian. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena (Nazir,2006:63).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini berlokasi di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan November Tahun 2019. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian ialah bahwa penulis menemukan permasalahan yang muncul di Desa Sungai Keranji terkait dengan Program bantuan rumah sederhana layak huni di Desa Sungai Keranji Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data Primer

Menurut Bungin (2011:132) data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yang pertama dilokasi penelitian, yaitu data hasil dari observasi berupa pendapat responden tentang implementasi bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni serta data hasil wawancara, kuisioner dan dokumentasi untuk memperjelas hasil dari observasi.

2. Data Sekunder

Menurut Bungin (2011:132) data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, yaitu data yang diperoleh dari kantor Desa Sei Keranji.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan melakukan tanya jawab dengan responden yang mengetahui pasti perencanaan usulan program bantuan RSLH dikabupaten Kuantan Singingi.
3. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh peneliti dengan mengambil proses yang berlangsung dilapangan dengan menggunakan alat teknologi (kamera).

3.5 Analisis Data

Padadasarnya proses analisis data itudimulai dari menelaah data dari keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai macam sumber, baik itu

pengamatan, wawancara, catatan lapangan lainnya. Metode pengelola data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu proses secara sistematis mencari dan mengelola berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian.

Dalam penelitian ini data yang telah di dapat peneliti kemudian di analisa dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara menerapkan informasi-informasi yang faktual yang diperoleh dari pihak sosial Desa Sungai Keranji mengenai Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni yang di analisis dengan berbagai teori yang ada dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3.6 Informan Penelitian

Menurut Bugin (2007:76), informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Menurut Sugiyono (2009:221), penentuan sample atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dalam penetapan informan, penulis menggunakan teknik *Purposive sampling* (pengambilan informasi berdasarkan tujuan), artinya orang yang dijadikan informan ditunjuk secara sengaja atau menunjuk langsung kepada orang yang dianggap dapat mewakili populasi, oleh karena itu teknik ini didasarkan atas kriteria atau pertimbangan-pertimbangan tertentu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun *informan* itu adalah Kepala desa, Kasi pelayanan dan kesejahteraan, Kepala Dusun, Organisasi Masyarakat Setempat, Tenaga Pendamping Masyarakat, Masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis dan Demografis Desa Sungai Keranji

Desa Sungai Keranji merupakan Desa yang berada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 1.325 Ha, yang terdiri dari 6 RW dan 13 RT. Sedangkan batas-batas Desa Sungai Keranji adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Emas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Datar
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jake
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Emas

Luas wilayah Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi 1.325 Ha dengan orbitrase jarak Desa sebagai berikut:

- a. Jarak dari Desa ke Kecamatan : 21 Km
- b. Jarak dari Desa ke Kabupaten : 35 Km
- c. Jarak dari Desa ke Provinsi : 155 Km

Adapun kondisi geografisnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. CurahHujan :1.500-2.500 Mm
- b. Jumlahbulanhujan : 8 bulan
- c. Suhu rata-rata harian : 24-35 C
- d. Tinggi tempat dari permukaan laut :400 Mdpl

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas wilayah adalah 1.325 KM. Luas tanah jika dirinci menurut jenis kegunaannya di Desa Sungai Keranji adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Luas Wilayah Desa Sungai Keranji Menurut Penggunaan

Luas pemukiman	260 ha/m
Luas perkebunan	1.041 ha/m
Luas kuburan	2 ha/m
Perkantoran	2 ha/m
Luas prasarana umum lainnya	20 ha/m
Total Luas	1.325 ha/m

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Keranji 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah Desa Sungai Keranji menurut penggunaannya luas pemukiman yaitu 260 ha/m, luas perkebunan 1.041 ha/m, luas prasarana umum lainnya 20 ha/m, dan dengan total luas wilayah Desa Sungai Keranji menurut penggunaannya adalah 1.325 ha/m.

Keadaan pertumbuhan jumlah penduduk Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dapat dirincikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Keterangan
1	Laki-laki	1.595 Jiwa
2	Perempuan	1.253 Jiwa
3	Jumlah	2.848 Jiwa

Sumber data: Kantor Desa Sungai Keranji 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi menurut jenis kelamin adalah 2848 jiwa dari 980 kepala keluarga (KK) dan dengan penduduk terbanyak adalah laki-laki yaitu 1.595 jiwa dan perempuan terdiri dari 1.253 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dilihat dari segi usia atau umur, maka jumlah masyarakat Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi adalah dapat dilihat pada tabel yang ada dibawah ini:

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Golongan Umur	Jumlah
1	0-5 Tahun	350 Jiwa
2	6-15 Tahun	370 Jiwa
3	16-25 Tahun	628 Jiwa
4	26-35 Tahun	588 Jiwa
5	36-45 Tahun	387 Jiwa
6	46-55 Tahun	280 Jiwa
7	56-65 Tahun	208 Jiwa
8	66-75 Tahun	30 Jiwa
9	>75 Tahun	7 Jiwa
	Jumlah	2.848 Jiwa

Sumber: Kantor kepala Desa Sungai Keranji 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk menurut usia yaitu 0-5 tahun berjumlah 350 jiwa, 6-15 tahun 370 jiwa, 16-25 tahun 628 jiwa, 26-35 tahun 588 jiwa, 36-45 tahun 387 jiwa, 46-55 tahun 280 jiwa, 56-65 tahun 208 jiwa, 66-75 tahun 30 jiwa, dan umur 75 tahun keatas hanya 7 jiwa.

4.2 Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi tercermin dalam mata pencaharian penduduk atau status usaha mereka dalam kehidupan rumah tangga. Di Desa Sungai Keranji mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Data selengkapnya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4
Mata Pencaharian Penduduk Desa Sungai Keranji

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	Petani	778 Jiwa
2	Buruh	1484 Jiwa
3	Buruh migrasi laki-laki	95 Jiwa
4	PNS	30 Jiwa
5	Pengrajin Industri Rumah Tangga	10 Jiwa
6	Pedagang Keliling	18 Jiwa
7	Peternak	271 Jiwa
8	Montir	18 Jiwa
9	Dokter Swasta	3 Jiwa
10	TNI	5 Jiwa
11	POLRI	10 Jiwa
12	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	8 Jiwa
13	Pengusaha kecil dan menengah	28 Jiwa
14	Dukun Kampung Terlatih	4 Jiwa
15	Seniman	3 Jiwa
16	Karyawan Perusahaan Swasta	83 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Sungai Keranji 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi adalah petani berjumlah 778 jiwa, buruh 1.484 jiwa, buruh migrasi berjumlah 95 jiwa, PNS berjumlah 30 jiwa, pengrajin industri rumah tangga berjumlah 10 jiwa, Pedagang keliling berjumlah 18 jiwa, peternak berjumlah 271 jiwa, montir berjumlah 18 jiwa, dokter swasta berjumlah 3 jiwa, TNI berjumlah 5 jiwa, POLRI berjumlah 10 jiwa, Pensiunan PNS/TNI/POLRI berjumlah 8 jiwa, pengusaha kecil dan menengah berjumlah 28 jiwa, dukun kampung terlatih berjumlah 4 jiwa, seniman berjumlah 3 jiwa, dan karyawan perusahaan swasta berjumlah 83 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Luas wilayah perkebunan di Desa Sungai Keranji ini 1.041 Ha/M2 dan mayoritasnya dalam perkebunan kelapa sawit. Dari 753 KK terdapat 500KK yang memiliki perkebunan kelapa sawit.

Tabel 4.5
Kepemilikan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Jumlah KK
(Kepala Keluarga) Desa Sungai Keranji

No	Keterangan	Jumlah KK
1	Memiliki kurang dari 5 ha	490
2	Memiliki 10-50 ha	8
3	Memiliki 50-100 ha	2
4	Jumlah Keluarga perkebunan kelapa sawit	500
5	Tidak memiliki kebun kelapa sawit	217

Sumber: Kantor Desa Sungai Keranji 2019

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya jumlah kepala keluarga di Desa Sungai Keranji 717 KK. Dan yang memiliki kebun kelapa sawit 500 KK dan tidak memiliki kebun kelapa sawit 217 KK. Dengan perincian yang memiliki kebun sawit kurang dari 5 Ha yaitu 490 KK, dan yang memiliki 10-50 Ha sebanyak 8 KK, dan yang memiliki kebun kelapa sawit 50-100 ha yaitu 2 KK.

4.3 Pendidikan dan Kehidupan Beragama

4.3.1 Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan manusia mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Dalam pelaksanaannya Pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga formal dan informal. Begitu juga halnya dengan Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi yang terdapat sarana dan prasarana pendidikan, diantara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Jumlah Sarana Pendidikan Formal/Informal di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	1
3	SD	2
4	PDTA (MDA)	1

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Keranji 2019

Dari tabel diatas bahwasannya sarana pendidikan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi yaitu PAUD berjumlah 1 buah, TK berjumlah 1 buah, sarana pendidikan SD berjumlah 2 buah yakni SDN 018 dan SDN 014, dan MDA berjumlah 1. Akan tetapi banyak juga anak-anak Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi yang menuntut ilmu di desa tetangga yaitu SLTP dan SLTA.

Dengan demikian penduduk Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi dapat menikmati sarana dan prasarana pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur tingkat pendidikan masyarakat yang ada. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.7

Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belom Sekolah	280
2	PAUD	90
3	TK	158
4	Sekolah Dasar	1.479
5	SLTP/MTs	389
6	SLTA/SMA	423
7	D1,D2,D3	53
8	S1	78

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Keranji 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan penduduk di Desa Sungai Keranji bahwa yang belum sekolah sebanyak 131 orang, TK sebanyak 140 orang, SD 738 orang, SLTP/MTS sebanyak 379 orang, SLTA/MA sebanyak 274 orang, D1, D2, D3 sebanyak 21 orang dan S1 sebanyak 26 orang.

4.3.2 Kehidupan Beragama

Sebagian besar penduduk Desa Sungai Keranji mayoritas beragama Islam.

Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

Jumlah Penduduk Desa Sungai Keranji Berdasarkan Agama

Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Islam	1.406 Orang	1.337 Orang	2.743 Orang
Kristen	50Orang	46 Orang	96Orang
Khatolik	5 Orang	4 Orang	9 Orang
Jumlah	1.461 Orang	1.387 Orang	2.848Orang

Sumber: Kantor Desa Sungai Keranji 2019

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Desa Sungai Keranji yang memeluk agama Islam 2.743 orang. Kemudian disusul dengan orang yang memeluk agama Kristen berjumlah 96 orang. Kemudian disusul dengan orang yang memeluk agama Katholik hanya 9 orang Kemudian tempat peribadatan di

Desa Sungai Keranji baik masjid, mushola dan gereja dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Jumlah Prasarana Peribadatan Desa Sungai Keranji

No	Tempat Beribadah	Jumlah
1	Masjid	2 buah
2	Mushola	7 buah
3	Gereja	2 buah

Sumber: Kantor Desa Sungai Keranji 2019

Dari tabel diatas maka dapat kita lihat bahwa jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah Masjid 2 buah, Musholah 7 buah, dan Gereja Kristen 1 dan Khatolik hanya 1 buah.

4.4 Kebudayaan dan Adat Istiadat

Sidi Gazalba mengatakan bahwa adat adalah suatu peraturan atau norma yang mengatur hubungan individu dengan masyarakat serta menjadi keseimbangan dalam masyarakat. Adapun kebudayaan dan adat istiadat bagi masyarakat Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Adapun adat istiadat yang mempunyai nilai agama yaitu:

1. Kegiatan keagamaan dalam bentuk perayaan di Desa Sungai Keranji pada saat Maulud Nabi Muhammad SAW dan Isra' Mi'raj yang diadakan di Masjid Desa Sungai Keranji yang dihadiri berbagai kalangan umat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

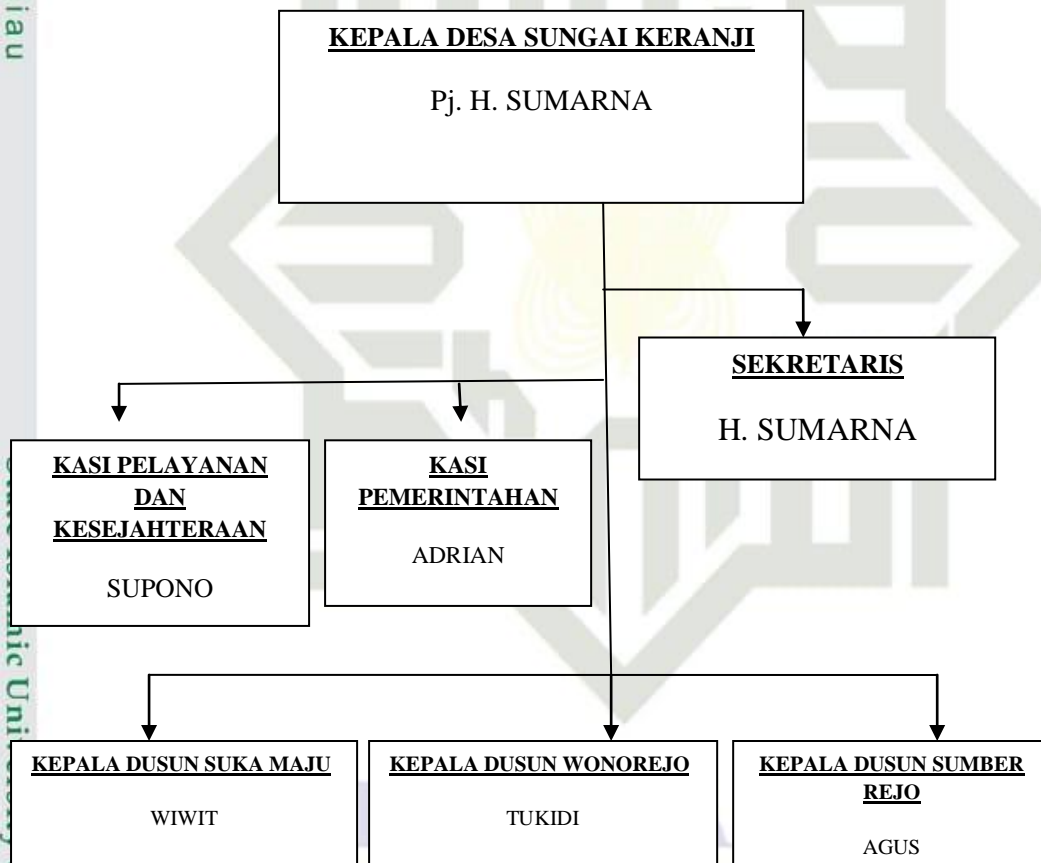
2. Pengajian bulanan, merupakan kebudayaan Islam yang sudah cukup lama diterapkan warga Desa Sungai keranji yang beragama Islam, yang diadakan sebulan sekali tepatnya pada minggu pertama hari Jum'at siang. Dan tempat pelaksanaan di Masjid dengan bergiliran disetiap RW pada tiap bulannya. Dan warga desa juga mengundang mubaligh/ penceramah dari dalam desa/ luar desa, kecamatan bahkan kabupaten untuk mengisi acara inti siraman rohani yang dihadiri semua kalangan di Desa Sungai Keranji.
3. Al-Barzanji yaitu sejenis budaya masyarakat Desa Sungai Keranji, yang dikenal sebagai kebudayaan Islam yang sangat terkenal. Al barzanji dilakukan pada ibu-ibu Desa Sungai Keranji setiap hari Minggu siang. Dan biasanya dilakukan juga pada acara:
 - a. Mencukur rambut/ pemberian nama anak yang telah dilahirkan.
 - b. Acara khitanan
 - c. Walimah/ pernikahan seseorang
 - d. Kenduri/ selamat sebagai ungkapan rasa syukur
4. Wirid yasin, merupakan suatu kebudayaan bagi umat Islam yang berada di Desa Sungai Keranji yang mereka adakan di setiap RT. Dan dilaksanakan pada hari yang ditentukan dari kesepakatan bersama di setiap RT. Dan biasanya untuk bapak-bapak dilaksanakan malam hari, dan ibu-ibu dilaksanakan pada siang harinya.

5. Kebudayaan pada warga yang beragama Kristen dan katolik di Desa Sungai Keranji juga melakukan ibadahnya di gereja tepatnya pada hari Minggu.

4.5 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Keranji

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Keranji



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 6.1.1 Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik, karena masih terdapat tahap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan SOP atau mekanisme sehingga terjadi permasalahan yaitu tidak tepatnya penerima bantuan RSLH, dan Implementasi Program Bantuan RSLH di Desa Sungai Keranji belum bisa mencapai tujuan yang di inginkan salah satunya yaitu mengurangi kemiskinan, dimana angka kemiskinan di Desa Sungai Keranji belum berkurang malah mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Sehingga perlu dilakukan pembenahan dalam pelaksanaan program bantuan RSLH agar tujuan dari pelaksanaan dapat terwujud dengan baik.
- 6.1.2 Kendala yang mempengaruhi Implementasi Program bantuan Rumah Sederhana Layak huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Faktor pendorong Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya adalah Sosialisasi yang dilaksanakan, pengetahuan masyarakat yang tinggi, komunikasi yang efektif , implementator yang berkualitas, sikap yang baik dari Tenaga Pendamping RSLH, serta SOP yang jelas dan sistematis.
- b. Faktor penghambat Implementasi program bantuan RSLH di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya adalah pelaksana yang tidak sesuai dengan SOP.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki Implementasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni dalam penanggulangan Kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan pendataan yang baik dan benar, guna mendapatkan data yang valid dan akurat mengenai siapa saja yang berhak dan seharusnya mendapatkan bantuan ini, sehingga tidak akan terjadi yang namanya tidak tepat sasaran.
- b. Pelaksana Program bantuan RSLH harus melaksanakan program ini sesuai dengan SOP yang berlaku, terutama tentang pendataan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: akencana Prenedeta Media Group.
- Harbani Pasolong. *Teori Administra* Leo Agustino. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta: Bandung.
- Lukman Hakim. 2011. *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jogjakarta.
- Panji Santosa. 2009. *Administrasi Publik*, Bandung.
- Riant Nugroho. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan*, Pt. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sondang P Siagian. 2005. *Administrasi Pembangunan*, Pt. Bumi Askara: Jakarta.
- Sudantoko, Djoko. 2009. *Dasar-Dasar Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: pt.pp Mardi Mulyo.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijkan Publik*, Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik ‘‘Konsep, Teori dan Politik’’*
- Taliziduhu Ndraha. 2003. *Kybernologi*, Pt. Rineka Cipta: Jakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. BumiAksara
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*, Pt. Buku Kita: Jakarta.
- Wirman Syafri. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*, Erlangga: Jakarta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Referensi Lain:

Al-Quran dan terjemahnya *Surah Adz-Dzariat ayat 16*. Bandung: Siygya Publishing.

_____. *Surah Al-Ma'un ayat 1-7*. Bandung: Siygya Publishing.

Peraturan Dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28A Dan 28H *Tentang Warga Negara Berhak Memiliki Tempat Tinggal Yang Aman, Nyaman Dan Tentram*.

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 *Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman*.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2011 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat*.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA SEI KERANJI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara

1. Pedoman wawancara dengan informan:

Data informasi

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Umur :
- d. Jabatan :
- e. Pendidikan terakhir :

I. Komunikasi

- 1) Menurut Bapak/Ibu bagaimana implementasi/pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Sei Keranji/ Apakah sudah berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ataupun masih ada masalah-masalah atau kendala dalam pelaksanaan ?
- 2) Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses sosialisasi program bantuan RSLH yang dilaksanakan di Desa Sei Keranji?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

II. Sumber Daya Manusia

- 1) Menurut Bapak/Ibu siapa saja Implementator yang terlibat yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Sei Keranji?
- 2) Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses perekrutan pelaksana program bantuan RSLH di Desa Sei Keranji/
- 3) Berapa dana yang dialokasikan pada pelaksana program bantuan RSLH di Desa Sei Keranji?
- 4) Menurut Bapak/Ibu apakah alokasi dana tersebut sudah mencukupi terlaksananya program bantuan RSLH di Desa Sei Keranji?

III. Disposisi

- 1) Apakah pelaksana program bantuan RSLH sudah melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab , jujur dan berkomitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
- 2) Menurut Bapak/Ibu bagaimana jika terjadi masalah sehingga masyarakat/penerima program bantuan RSLH membuat laporan/aduan dan bagaimana para pelaksana menyikapi hal tersebut?

IV. Struktur Birokrasi

- 1) Bagaimana SOP pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Sei Keranji?
- 2) Menurut Bapak/Ibu apakah SOP yang telah ditetapkan mempunyai kerangka kerja yang jelas dan sistematis?
- 3) Menurut Bapak/Ibu apakah pelaksana Program bantuan RSLH di Desa Sei Keranji sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan?



- 4) Bagaimana struktur organisasi dalam pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Sei Keranji?
- 5) Menurut Bapak/Ibu bagaimana Proses Pemilihan peserta/penerima bantuan RSLH?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pedoman Wawancara dengan Masyarakat

Data informasi

- a. Nama :
- b. Jenis kelamin :
- c. Umur :
- d. Jabatan :
- e. Pendidikan terakhir :

Daftar pertanyaan :

- 1) Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksana program bantuan RSLH pernah melakukan sosialisasi mengenai Program RSLH ini kemasyarakat umum ?
- 2) Menurut Bapak/Ibu bagaimana implementasi /pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Sei Keranji?
Apakah sudah berjalan lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku atau masih ada masalah-masalah atau kendala dalam pelaksanaannya?
- 3) Menurut Bapak/Ibu apa dampak dan manfaat Program bantuan RSLH ini bagi masyarakat khususnya bagi penerima bantuan program bantuan RSLH?
- 4) Menurut Bapak/Ibu sejauh ini apakah sudah berjalan dengan baik hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program bantuan RSLH di Desa Sei Keranji?



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 17 TAHUN 2011

TENTANG PETA JUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- a. bahwa dalam rangka operasionalisasi program bidang Permukiman melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat maka perlu pedoman pelaksanaan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan untuk kelancaran pelaksanaan Program dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011.
-
1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Riau. (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9).
7. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun 2010 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2010 Nomor 8).
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Riau Tahun 2010 (Berita Daerah Propinsi Riau Tahun 2010 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2011

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011 meliputi program :

- a) Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni
- b) Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perdesaan
- c) Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan
- d) Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai

Pasal 2

Sistematika Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a) BAB I UMUM
- b) BAB II ORGANISASI
- c) BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN
- d) BAB IV PENUTUP

Pasal 3

Naskah Pedoman Pelaksanaan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dalam melakukan operasionalnya mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan .

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 - 3 - 2011

GUBERNUR RIAU

dto

H.M. RUSLI ZAINAL

Undangan di Pekanbaru
pada tanggal 18 - 3 - 2011

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU

dto

H. WAN SYAMSIR YUS
Pembina Utama Madya
NIP. 19530305 197306 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2011 NOMOR 17

UIN SUSKA RIAU



GUBERNUR RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Su

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau telah disusun Program Sharing antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan tersebut diantaranya pembangunan bidang permukiman yakni melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Bantuan Prasarana Infrastruktur Pedesaan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan, dan Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai.

Program tersebut akan dilakukan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat dengan pertimbangan kegiatan ini akan membuka akses ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan produksi dan distribusi, memberikan lapangan kerja, serta membuka peluang-peluang baru bagi berbagai aktivitas masyarakat. Oleh karena itu program tersebut merupakan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal agar mampu berkembang lebih sejahtera.

Mengingat mekanisme penyelenggaraan program Pembangunan Bidang Permukiman tersebut melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka disamping akan memperoleh manfaat dari terbangunnya infrastruktur, diharapkan pula agar masyarakat akan semakin terbiasa dengan pola-pola pembangunan yang partisipatif yang dapat membangkitkan munculnya rasa memiliki yang lebih tinggi di masyarakat.

Untuk operasionalisasi program Bidang Permukiman, pemerintah Provinsi telah menyiapkan Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2011, sebagai acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan kegiatan tersebut, sehingga dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran, dengan peluang mungkin terjadinya penyimpangan.

Akhirnya diharapkan petunjuk pelaksanaan ini dapat dipakai dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap pihak yang terkait.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, 17 - 3 - 2011

GUBERNUR RIAU

dito

H.M. RUSLI ZAINAL

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Su
n Syarif Kasim Riau



BAB I UMUM

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.1 LATAR BELAKANG

Provinsi Riau sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama minyak bumi, namun demikian sampai dengan Maret tahun 2009 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), di Provinsi Riau masih terdapat penduduk miskin sekitar 9,48 % dari seluruh jumlah penduduk. Ditinjau dari tingkat kepemilikan tanah, yaitu masyarakat miskin yang mendiami rumah tidak sehat yang tidak layak huni dan bahkan belum memiliki rumah sekitar 40.000 kepala keluarga. Ditinjau dari pelayanan air bersih pada masyarakat Desa/Kepenghuluan/Kelurahan dan jalan poros Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang menjadi urat nadi perekonomian di Desa/Kepenghuluan/Kelurahan masih sangat rendah. Umumnya Permukiman Masyarakat di daerah Provinsi Riau berkembang dimulai dari Permukiman di bantaran Sungai karena sungai dahulunya menjadi sarana Transportasi bagi Masyarakat.

Dengan kemauan yang keras dan tekad yang bulat Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengentaskan kemiskinan, melalui Program K2I yaitu pemberantasan Kebodohan, pengentasan Kemiskinan, dan Peningkatan Infrastruktur, untuk mensejahterakan masyarakat, meningkatkan Sumber Daya Manusia dan meningkatkan pelayanan serta pertumbuhan investasi pada sektor riil.

1.2 MAKSUD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di perdesaan/kelurahan dan di perkotaan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya perdesaan/kelurahan semakin tumbuh dan berkembang.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



1.3 TUJUAN

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara :

- Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di perdesaan/kelurahan dan perkotaan.
- Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
- Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat perdesaan/kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
- Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

SASARAN

Sasaran dari program ini adalah Masyarakat di Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang tergolong miskin, tertinggal dan pada kawasan perbaiki/peningkatan kualitas Permukiman (Resettlement).

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan adalah peningkatan/pembangunan rumah sederhana layak huni, infrastruktur perdesaan/kelurahan yang mencakup jalan perdesaan/kelurahan, penyediaan air minum perdesaan/kelurahan dan relokasi permukiman masyarakat pinggir Sungai, yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat.

1.6 PRINSIP dan PENDEKATAN

1.6.1 PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip prinsip penyelenggaraan Program ini adalah sebagai berikut :

- Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (*acceptable*) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana perdesaan/kelurahan terbangun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (*transparan*) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c) Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.
- d) Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (*sustainable*) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan/kelurahan yang mandiri oleh masyarakat.

1.6.2 PENDEKATAN

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui :

- a) Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan.
- b) Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin.
- c) Otonomi dan desentralisasi, masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya.
- d) Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.
- e) Keswadayaan, motivasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan.
- f) Keterpaduan, pembangunan dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.



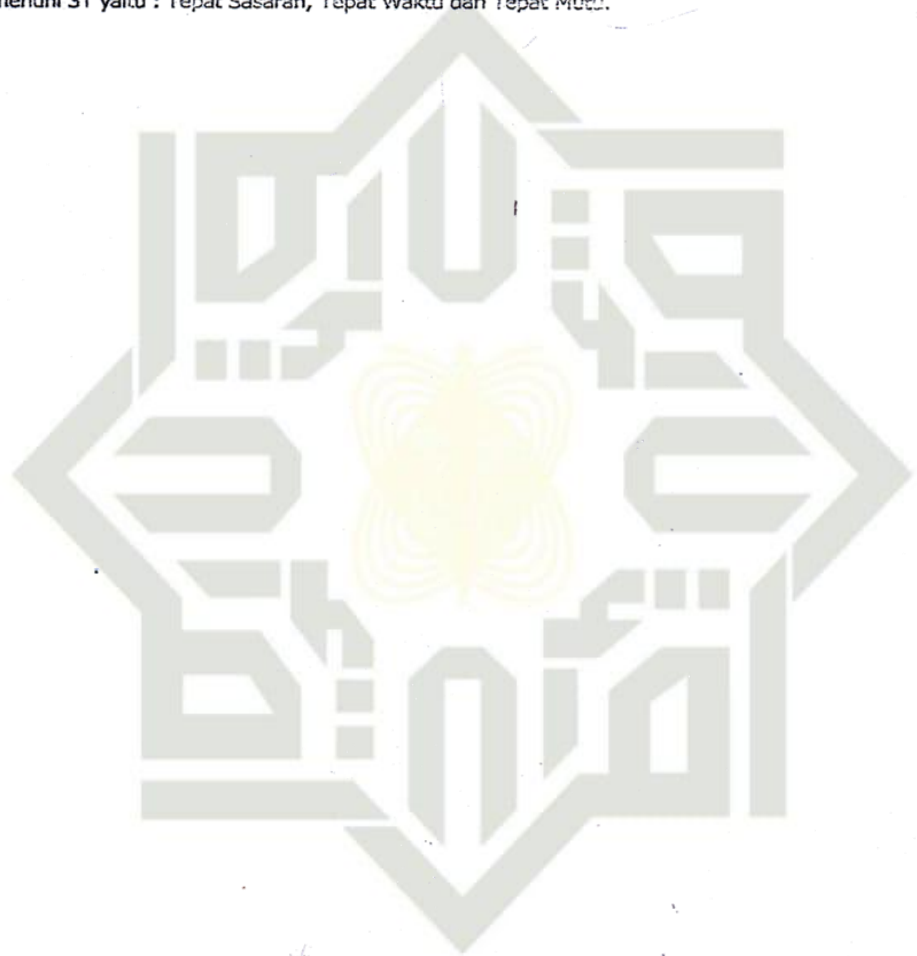
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 INDIKATOR KEBERHASILAN.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program ini ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a) Terbangunnya Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat miskin, infrastruktur dasar berupa jalan perdesaan/kelurahan, air minum perdesaan/kelurahan dan peningkatan kualitas permukiman masyarakat pinggir Sungai.
- b) Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun.
- c) Memenuhi 3T yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.



UIN SUSKA RIAU

BAB II ORGANISASI

UMUM.

Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan/Kelurahan dan Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai dilaksanakan dengan Pola pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, Kepenghuluhan/Kelurahan serta Organisasi Masyarakat Setempat (OMIS) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat Desa, Kepenghuluhan/Kelurahan.

TINGKAT PROVINSI.

Pelaksanaan Program ini difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Bidang Permukiman.

Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan/Kelurahan dan Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai Pola Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

2.2.1 Pengendali Kegiatan

Pengendali Kegiatan adalah Kepala Seksi Permukiman Perdesaan dengan dibantu oleh seksi lainnya di bidang permukiman yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran serta Pengguna Anggaran.

2.2.2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan/Kelurahan, dan Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir sungai dengan pola pemberdayaan masyarakat ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab secara teknis dan administrasi keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

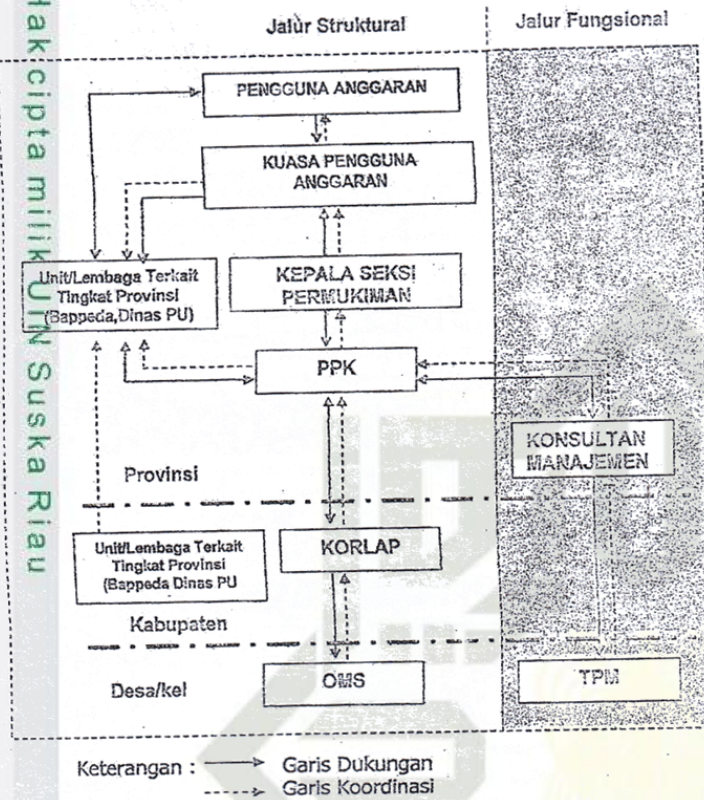
Tugas dan Tanggung Jawab PPK sebagai berikut :

- a) Membantu pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun administrasi keuangan;
- b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.3 Koordinator Lapangan (Korlap)

Koordinator Lapangan (Korlap) bertugas membantu PPK melakukan persiapan pelaksanaan di lapangan, monitoring dan evaluasi semua kegiatan di lapangan secara berkala, juga berkoordinasi dengan lembaga terkait di kabupaten/kota serta membuat dan menandatangani laporan perkembangan hasil pelaksanaan di lapangan dan melaporkan kepada PPK.

STRUKTUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (OMS)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3. TINGKAT KABUPATEN/KOTA

2.3.1. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota

Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dengan melibatkan Bappeda Kab/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kab./Kota, Instansi Pemberdayaan Masyarakat (BPPM), dan Instansi terkait lainnya, dalam mensosialisasikan program, memantau, serta memberi dukungan atas kelancaran pelaksanaan program di tingkat kabupaten/kota.

2.4. TINGKAT KECAMATAN dan DESA, KEPENGHULUAN/ KELURAHAN

2.4.1. Kecamatan.

Tingkat kecamatan terdiri dari perangkat kecamatan, tokoh masyarakat (agama, adat dan ormas) dengan tugas sbb :

- Menghadiri sosialisasi program ini tingkat Provinsi dan menginformasikan kepada pihak yang berkepentingan ditingkat kecamatan.
- Membantu memfasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya.

2.4.2. Desa, Kepenghuluan/Kelurahan.

Untuk pelaksanaan program ini, di tingkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan ditetapkan kelembagaan masyarakat (OMS) yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah meliputi:

- Penetapan Kepengurusan Organisasi Masyarakat setempat (OMS)
- Penetapan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sesuai dengan kebutuhan.

2.5. PELAKSANA KEGIATAN

2.5.1. ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)

Organisasi Masyarakat Setempat adalah Organisasi yang berasal dari Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang kepengurusannya ditetapkan/disyahkan oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah melalui Surat Keputusan. Susunan OMS terdiri dari Ketua OMS dan Bendahara.

Tugas dan tanggung jawab OMS adalah :

- a) Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Desa, Kepenghuluan/Kelurahan.
- b) Mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di Desa, Kepenghuluan/Kelurahan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan suatu masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Menandatangani kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- d) Menyusun rencana kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD), yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan manajemen.
- e) Mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- f) Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong royong.
- g) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Konsultan Manajemen dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatan serta tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap Unit Kegiatan.
- h) Mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penggunaan dana (LPD) yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah.
- i) Bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan.

Persyaratan Kepengurusan OMS :

- a) Ketua dan Bendahara OMS adalah Ketua dan Bendahara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepenghuluan/ Kelurahan;
- b) Ketua dan Bendahara OMS dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Desa, Kepenghuluan/ Kelurahan penerima bantuan;
- c) Jujur dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di lapangan;
- d) Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. Sabar, arif dan bijaksana serta dapat diterima semua pihak.
- e) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2.6 PEMELIHARAAN

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lapangan dilakukan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di Desa, Kepenghuluan/Kelurahan tersebut dengan swadaya masyarakat. Adapun unsur pemeliharaan tersebut terdiri dari unsur perangkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan, unsur Badan Perwakilan Desa, Kepenghuluan/Kelurahan (BPD) dan masyarakat.



Khusus untuk kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, relokasi dan Air Bersih Perdesaan/Kelurahan yang berupa Penampungan Air Hujan (PAH) pemeliharaannya dilakukan oleh penerima bantuan.

2.6.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PEMELIHARA DAN PEMANFAAT (KPP)

Tugas dan Tanggung Jawab KPP adalah :

- Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh OMS sesuai perjanjian kerja dari Pejabat Pembuat Komitmen.
- Memelihara dan memanfaatkan hasil kegiatan secara maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.

Persyaratan Kepengurusan KPP :

- Ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa di tingkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan merupakan kepengurusan inti KPP, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 1 anggota.
- Mempunyai pengetahuan tentang peta Desa, Kepenghuluan/Kelurahan dan arah pembangunan Desa, Kepenghuluan/Kelurahan serta peduli terhadap pembangunan Desa, Kepenghuluan/Kelurahannya.
- Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.
- Tidak menuntut perolehan imbalan dari kegiatan dan bekerja dengan pengorbanan yang tinggi, tulus, ikhlas lahir dan bathin.

KONSULTAN MANAJEMEN

Dalam pelaksanaan Kegiatan Rumah Sederhana Layak Huni, Infrastruktur Perdesaan dan Air Minum Perdesaan, Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai PPK dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional terdiri dari Konsultan Manajemen dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) tingkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan.

Konsultan manajemen ditunjuk melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP).

Tugas Konsultan Manajemen adalah :

- Memberi masukan/advice baik secara teknis dan administrasi kepada pihak terkait dalam kegiatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala, menyampaikan laporan bulanan kepada PPK yang dilaporkan setiap 2 minggu sekali yaitu paling lambat tanggal 5 s/d status pelaksanaan akhir bulan sebelumnya dan paling lambat tanggal 20 untuk status pelaksanaan kegiatan dari tanggal 1 s/d 15 setiap bulan berjalan.
- Menyusun laporan akhir tahun pelaksanaan kegiatan;
- Memberikan bimbingan teknis dan administrasi kepada Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
- Membantu PPK mengkoordinasikan laporan setiap minggu dari TPM untuk kegiatan di tingkat Kabupaten;
- Membantu PPK mengevaluasi hasil laporan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan yang dilaporkan oleh OMS dan TPM;
- Membantu OMS dalam penyusunan RAB;
- Membantu PPK dalam mensosialisasikan program;
- Bertanggung jawab kepada PPK.

Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

TPM diseleksi oleh Panitia Rekrutmen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan bertugas di Desa, Kepenghuluhan/ Kelurahan selama berlangsungnya kegiatan.

Adapun persyaratan menjadi TPM adalah :

1. Berlatar belakang minimal setingkat D3 Teknik Sipil, Arsitektur dan Teknik Lingkungan/ Penyehatan dimana kegiatan dilaksanakan dan dinilai mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kegiatan infrastruktur di Desa, Kepenghuluhan/ Kelurahan.
2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik.
3. Jujur dan bertanggung jawab.
4. Mampu bekerjasama dalam tim.
5. Sebelum pelaksanaan fisik di lapangan, calon TPM harus bersedia secara mandiri mengikuti pelatihan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah :

- a). Membantu PPK dalam mensosialisasikan kegiatan tingkat masyarakat.
- b). Memberikan bimbingan teknis (Pembuatan Gambar Rencana, pengukuran, serta dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya) sebagaimana format yang telah ditetapkan.
- c). Melakukan pengawasan terhadap mutu dan volume pelaksanaan kegiatan.
- d). Membuat laporan mingguan yang disampaikan kepada PPK



BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN

Mekanisme penyelenggaraan pembangunan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan/Kelurahan dan Relokasi Permukiman Masyarakat Pinggir Sungai dengan pola pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan, dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendorong.

3.1 TAHAPAN PERSYAPAN

- Penetapan lokasi dan anggaran
- Penyusunan Pedoman
- Pengadaan dan Penyiapan Konsultan Manajemen/Perencanaan
- Sosialisasi program tingkat Provinsi
- Musyawarah Desa, Kepenghuluan/Kelurahan untuk Proses Penentuan Lokasi / Penerima bantuan RSLH, penerima bantuan PAH, Penyusunan RAB.
- Pelatihan TPM dan ketua OMS.
- Pengesahan/validasi RAB.
- Pembukaan Rekening oleh OMS dan Penyiapan Kontrak.
- Penandatanganan Kontrak.

3.1.1 KRITERIA DESA, KEPENGHULUAN/KELURAHAN SASARAN

Desa, Kepenghuluan/Kelurahan sasaran dipilih berdasarkan kategori Desa, Kepenghuluan/Kelurahan miskin dan tertinggal sesuai dengan hasil penelitian BALITBANG serta data BPS. Disamping itu juga memperhatikan usulan dan aspirasi dari Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang benar-benar memerlukan sesuai dengan sasaran program ini.

Dalam rangka membangun sinkronisasi dan sinergitas program maka diperlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk menghindari terjadinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumpang tindih kegiatan di suatu Desa, Kepenghuluan/ Kelurahan.

Adapun kriteria Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang mendapat menerima bantuan prioritas adalah :

- a) Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang minim infrastruktur, baik jalan perdesaan/kelurahan, banyaknya rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni, Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang rawan air dan Lingkungan Kawasan Kumuh.
- b) Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang kondusif (tidak ada konflik sosial)

3.1.2 Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman dilaksanakan dengan melakukan penyempurnaan terhadap pedoman yang sudah ada. Penyempurnaan tersebut berdasarkan pada hasil pembelajaran dari pelaksanaan program sebelumnya, berbagai masukan dan penerapan kebijakan termasuk pendekatan, prinsip, mekanisme, dan indikator keberhasilan yang akan dicapai.

3.1.3 Pengadaan dan penyiapan konsultan pendamping.

Konsultan pendamping terdiri dari konsultan manajemen dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Proses pelelangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Sedangkan pengadaan TPM direkrut sebagai tenaga pengawas lapangan dengan terlebih dahulu dilakukan ujian dan pelatihan.

3.1.4 Sosialisasi program tingkat provinsi.

Sosialisasi dilaksanakan untuk menyebarkan konsep, mekanisme penyelenggaraan program dan menyatukan persepsi dalam pelaksanaan program. Sosialisasi dilaksanakan pada tingkat provinsi.

3.1.6 Musyawarah Desa, Kepenghuluan/Kelurahan untuk proses penyiapan.

Musyawarah Desa, Kepenghuluan/Kelurahan ini difasilitasi oleh OMS bersama perangkat Desa, Kepenghuluan/Kelurahan yang bertujuan untuk :

- a) Mengidentifikasi calon penerima bantuan dan lokasi kegiatan berdasarkan skala prioritas.
- b) Menetapkan penerima bantuan/lokasi kegiatan.
- c) Membuat dan menetapkan rencana kegiatan.
- d) Hasil penetapan Musyawarah Desa, Kepenghuluan/ Kelurahan disahkan oleh Surat Keputusan Kepala

Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)

UIN SUSKA RIAU



Desa/Penghulu/Lurah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah.

3.1.7 PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

- Harga bahan dan upah dibuat oleh OMS berdasarkan survei sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah.
- Rencana Anggaran Biaya dibuat oleh OMS dan di setujui oleh PPK.

3.1.8 PEMBUKAAN REKENING OMS

Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) disahkan, maka OMS segera membuka rekening di Bank Riau terdekat.

Untuk membuka rekening atas nama OMS yang bersangkutan akan ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur diantaranya : Ketua OMS dan Bendahara OMS.

3.1.9 PENANDATANGANAN KONTRAK

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan selesai disiapkan maka dilakukan penandatanganan kontrak antara OMS dengan Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui oleh Kepala Bidang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau di Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

3.1.10 PROSES PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

Sumber Dana untuk program ini berasal dari APBD Provinsi Riau dan dikenakan pungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Pencairan dana dibagi dalam 3 tahap.

- Tahap Pertama**, OMS dapat mengajukan dana 40% dari total kontrak dengan target fisik yang harus diselesaikan sebesar 40% dari total volume fisik. Persyaratan yang harus dilampirkan adalah :
 - > Kontrak Kerja;
 - > Rencana Penggunaan Dana Tahap I;
 - > Kwitansi Pembayaran Tahap Pertama.
- Tahap Kedua**, dibayar 30 %, apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik - 36 % dari total target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut :
 - Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM, Konsultan Manajemen.
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan di tandatangi oleh OMS, TPM, Konsultan, korlap dan disetujui PPK.
 - Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua.
 - Kwitansi Pembayaran Tahap Pertama.
 - Administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Tahap ketiga, dibayar 30 %, apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 70 % dari target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut
 - Laporan progres fisik dan keuangan yang ditandatangani oleh OMS, TPM, Konsultan Manajemen.
 - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan di tandatangi oleh OMS, TPM, Konsultan, korlap dan disetujui PPK.
 - Rencana Penggunaan Dana Tahap Ketiga.
 - Kwitansi Pembayaran Tahap Kedua.
 - Administrasi lainnya (foto pelaksanaan fisik).
 - Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan pekerjaan (SPKMP) bermaterai.

3.2 TAHAPAN PELAKSANAAN FISIK

- Penyiapan lokasi.
- Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dalam 3 (tiga) tahap.
- Pengadaan material dan barang.
- Pelaksanaan fisik.

3.3 TAHAPAN MONITORING

- Monitoring dilakukan oleh Koordinator Lapangan/PPK/ Pengendali kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Monitoring dilakukan minimal dalam tahapan pencairan dana oleh OMS.

3.4 TAHAPAN PASCA PELAKSANAAN FISIK

- Pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan.
- Serah terima pekerjaan antara OMS ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Serah terima pekerjaan dari PPK ke Pengguna Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat ini diharapkan menjadi pegangan bagi seluruh pelaku yang terkait dalam Implementasi pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan dan Kegiatan Relokasi Masyarakat Pinggir Sungai dengan Pola pemberdayaan masyarakat. Petunjuk Pelaksanaan Pola Pemberdayaan Masyarakat dilengkapi dengan Lampiran Pedoman Teknis Pelaksanaan untuk Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Perdesaan/Kelurahan dan Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan/Kelurahan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara peneliti bersama Pj. Kepala Desa Sungai Keranji



Gambar 2. Wawancara Peneliti bersama Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan Desa Sungai Keranji

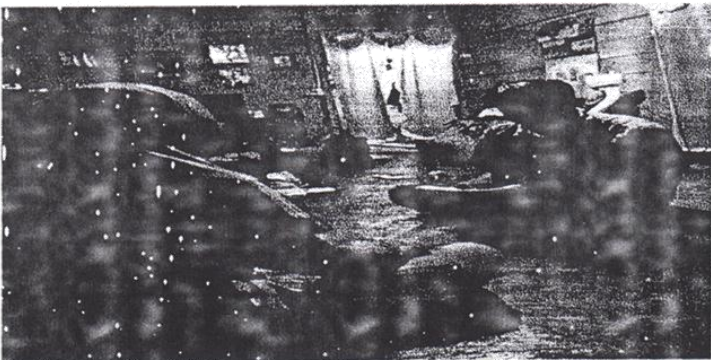
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



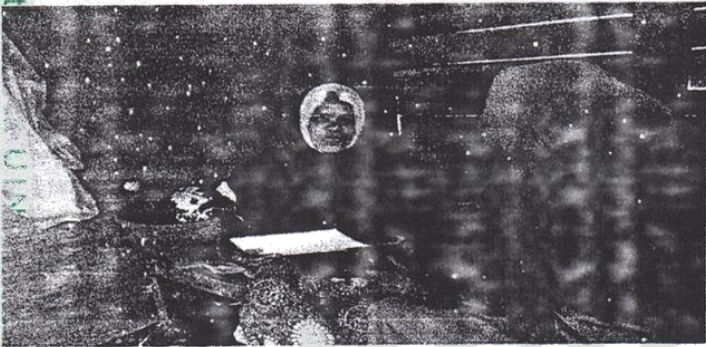
Gambar 3. Wawancara peneliti bersama Kepala Dusun Sumber Rejo Desa Sungai Keranji



Gambar 4. Wawancara peneliti bersama OMS Desa Sungai Keranji

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara peneliti bersama masyarakat Desa Sungai Keranji



Gambar 6. Wawancara peneliti bersama masyarakat Desa Sungai Keranji



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

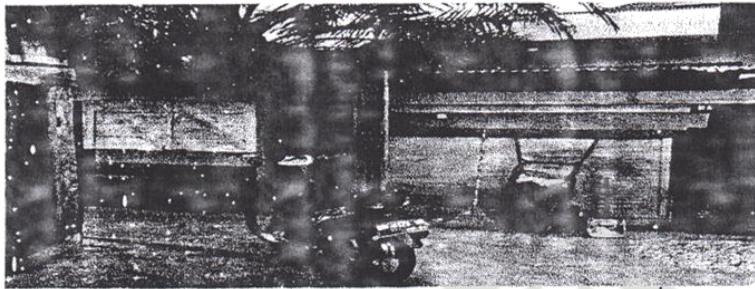
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak menandakan persetujuan atau dukungan UIN Suska Riau.

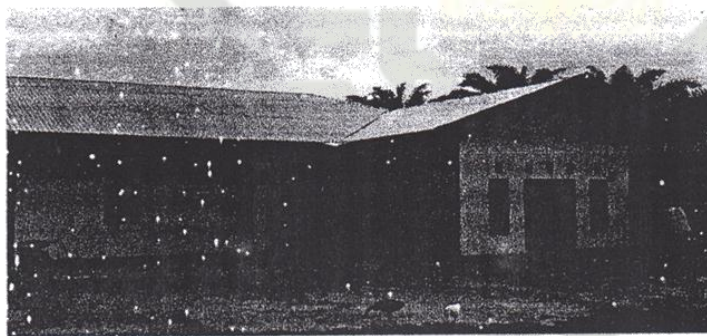
2. Dilarang mempergunakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7. Rumah Keluarga yang tidak layak huni Di Desa Sungai Keranji



Gambar 8. Rumah Keluarga yang tidak layak huni di Desa Sungai Keranji



Gambar 9. Rumah Yang mendapatkan bantuan RSLH Desa Sungai Keranji

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-567031
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

: Un.04/F.VII/PP.00.9/3269/2019
: Biasa
: -
: **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 08 Mei 2019 M
3 Ramadhan 1440 H

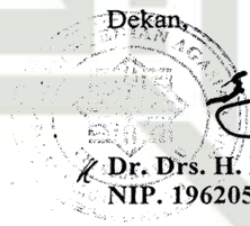
Kepada
Yth. **Ratna Dewi, S. Sos, M. Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
N a m a : Diah Amelia Hanip
NIM : 11575201895
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Rumah Sederhana Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, NIM %
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lainnya.
Dilarang mengutip atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan pendidikan atau penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24758
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : 001/2019/F.VII/PP.00.9/4542/2019** Tanggal 19 Juli 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : DIAH AMELIA HANIP |
| 2. NIM / KTP | : 11575201895 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SUNGAI KERANJI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA SUNGAI KERANJI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juli 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 071/DPMPTSPK-PTSP/2019/286

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TUGAS AKHIR

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/24758 tanggal 29 JULI 2019.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	DIAH AMELIA HANIP
NIM	:	11575201895
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang Pendidikan	:	FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Alamat	:	S1
Judul Penelitian	:	PEKANBARU
	:	"IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SUNGAI KERANJI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	DESA SUNGAI KERANJI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 15 Agustus 2019

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH,S.Sos.MM
Pembina IV.a
NIP 19750806200012 1 001



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN SINGINGI
KANTOR DESA SUNGAI KERANJI

Jl. Nusa Indah Desa Sungai Keranji - 29563

SURAT KETERANGAN

Nomor : 538/2019/145

Kepala Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **DIAH AMELIA HANIP**
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Keranji / 01 April 1997
NIM : 11575201895
Jurusan : Administrasi Negara
Alamat : Pekanbaru

Bahwa nama tersebut di atas benar benar telah melakukan riset sebagai penelitian guna menyelesaikan tugas akhir dengan judul " IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI DESA SUNGAI KERANJI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI " .

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Keranji, 20 November 2019
Kepala Desa Sungai Keranji



**KEPALA DESA
SUNGAI KERANJI**
NIP. 197107152007011042

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT PENULIS



Diah Amelia Hanip, lahir di Taluk Kuantan, Sungai Keranji 1 April 1997. Merupakan anak Kedua dari dua (2) bersaudara. Ayah bernama Gito dan ibu bernama Suparti. Tahun 2009 penulis menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri 018 Sungai Keranji. Pada tahun 2012 penulis menyelesaikan pendidikan di MTs Bahrul Ulum Singingi dan pada tahun 2015

penulis menyelesaikan pendidikan di SMAN 2 Singingi. Tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Pekanbaru melalui jalur PBUD, dan penulis diterima di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2018 di Dinas BAPPEDA Kuantan Singingi . Pada tahun yang sama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Tanjung Palas, Dumai, Provinsi Riau.

Berkat rahmat Allah Swt pada tanggal 23 April 2020 penulis telah menyelesaikan pendidikan di UIN SUSKA Riau dengan tugas akhir atau skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA SUNGAI KERANJI KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.)”**